

**PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI PEMERINTAH DESA WONOKERTO KABUPATEN
LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Arief Setyawan

Progam Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ariefsetyawan433@gmail.com;

Achluddin Ibnu Rochim

Progam Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

Bambang Kusbandrijo

Progam Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
bk.untag@gmail.com;

ABSTRAK

Sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan Bupati No. 48 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa sebagai perangkat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat Desa Wonokerto dan pengelolaan sumber daya. Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menjadi objek kajian penelitian karena berdasarkan permasalahan yang ditemukan tidak mengoptimalkan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam pencarian data (kependudukan, potensi desa, laporan, perencanaan dan penganggaran) yang membuat pengguna sistem informasi desa dalam pelayanan menjadi kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori e-government yang dikemukakan Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) apa yang disebut sebagai *balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan yang terdapat dua faktor. Pertama faktor pendukung : kebijakan yang telah terlaksana, anggaran yang ada di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung ini telah mencukupi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif. Kedua faktor penghambat :

keterbatasan Sumber Daya Manusia, minimnya pendampingan dari Diskominfo Lumajang pada saat pelatihan Sistem Informasi Desa, dan koordinasi dengan pihak Diskominfo Lumajang yang kurang

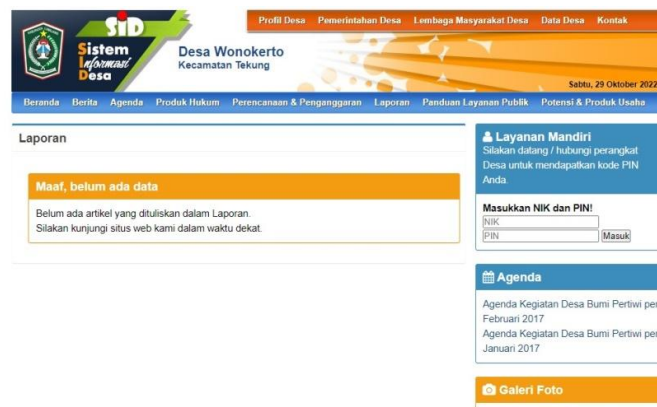
Kata kunci: *Sistem Informasi Desa, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah pemekaran dari wilayah administratif Indonesia dan berada di bawah sub-bagian yang dipimpin oleh kepala desa. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang mendukung sistem informasi memegang peranan baik di sektor swasta atau instansi pemerintah, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah desa untuk garda terdepan pelayanan publik perlu menyiapkan kapasitas mesin desa dalam pelayanan pengembangan masyarakat dan perencanaan untuk mewujudkan desa mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Maka karena itu sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa, sebagai perangkat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat desa dan pengelolaan sumber daya.

Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menjadi objek kajian penelitian ini karena berdasarkan permasalahan atau data yang ditemukan penulis ini di Kantor Balai Desa Wonokerto yang merupakan suatu desa yang tidak mengoptimalkan atau memanfaatkan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam pencarian data (kependudukan, potensi desa, umkm, laporan, perencanaan dan penganggaran) yang membuat sistem informasi desa menjadi kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dalam memanfaatkan SID (sistem informasi desa) dengan minimnya keterbukaan informasi untuk dilakukan dari aparat desa ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat Desa Wonokerto berkurang karena masyarakat menganggap bahwa otonomi ini tidak sejalan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa.

Berikut salah satu tampilan aplikasi Sistem Informasi Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang belum di dimanfaatkan atau dioptimalkan.



Gambar. 1.1 Tampilan Sistem Informasi Desa Wonokerto
Sumber: (<https://www.wonokerto-tekung.lumajangkab.go.id>)

Maka hasil data yang ingin di akses dalam SID (Sistem Informasi Desa) di atas Desa Wonokerto telah gagal menerapkan penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Mengingat masyarakat merupakan bagian penting dari implementasi elektronik pemerintah.

Menurut Indrajit (2002) E-Government adalah sebuah gagasan interaksi yang baru dari pemerintah kepada masyarakat dan kalangan lainnya (stakeholder); dimana dalam kenyataannya melibatkan pemanfaatan teknologi informasi (terutama internet) maupun media elektronik; dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas untuk pelayanan yang dilakukan salah satunya di penggunaan SID Sistem Informasi Desa dalam pelayanan publik. Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) mengemukakan apa yang disebut sebagai *balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan.

Oleh karena itu, berdasarkan data atau permasalahan yang di temukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Wonokerto di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam Pelayanan publik di pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna keterbukaan informasi dan faktor-faktor lainnya dalam implementasi aplikasi sistem informasi desa tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. Dengan menganalisis penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*. Untuk memperoleh data dan hasil dari kesimpulan yang ada di Kantor Desa Wonokerto dengan sehubungan penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik di pemerintah desa. Maka itu sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa. Peneliti menggunakan teori e-government yang dikemukakan Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) apa yang disebut sebagai *balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID)

Pada tahapan ini awal mulanya wajib penerapan SID di beberapa desa di dukung dari Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2019 suatu implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, badan-badan ataupun golongan. Pelayanan yang diberikan dalam hal ini adalah pelayanan yang berkaitan dengan pemberian atau penyediaan ruang akses informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan menurut Eddy Satriya (2009) yaitu: Sebagai upaya memanfaatkan dan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintah, memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan memberikan akses informasi kepada masyarakat/publik secara lebih luas, dan menjadikan pengelolaan pemerintahan lebih (accountable) dan serta transparan kepada publik. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa Wonokerto ini harmonisasi dan sinkronisasi yang menghasilkan sinergi positif antar sector pembangunan dan iptek menjadi syarat penting dalam mengembangkan kapasitas daya saing desa. Untuk implementasi website ini terbagi tiga, yaitu: a) Perangkat Keras : ini dapat dijalankan pada computer/laptop. b) Perangkat Lunak: menjalankan website ini dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Opera dan lain-lain. c) Sumber Daya Manusia: pada pelaksanaan ini dibutuhkan seorang user atau admin yang mampu menjalankan atau mengoperasikan computer untuk menjalankan Sistem Informasi Desa yang telah dibuat sehingga penerapan sistem ini dapat berjalan dengan benar dan lancar. Untuk memasuki laman e-government pada Desa Wonokerto ini dapat dilakukan melalui <https://wonokerto-tekung.lumajangkab.go.id/index.php/siteman>.

Kantor Desa Wonokerto Kecamatan Tekung adalah tempat terpencil di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang menggunakan SID (Sistem Informasi Desa Wonokerto) dalam pelayanan publik di pemerintah Desa Wonokerto yang telah diciptakan pada tahun 2019. Website Sistem Informasi Desa ini merupakan bentuk solusi atau inovasi dari pemerintahan kepada masyarakat Desa Wonokerto dalam memberikan informasi atau pelayanan tanpa harus datang langsung ke Kantor Desa Wonokerto. Dan masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses sendiri yang dapat dilalui dengan internet. Dalam penelitian yang dilakukan adalah bagaimana pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, serta apa saja faktor penghambat dan pendukung pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Tekung.

Manfaat

Manfaat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Termasuk dalam kriteria ini adalah:

- 1) Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan
- 2) Bagaimana layanan tersebut bisa diakses dalam “one stop shop” dari satu portal menuju berbagai layanan
- 3) Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut.

Untuk pemanfaatan teknologi informasi ini dapat menjadi suatu bagian dalam tata kelola di pemerintah desa Wonokerto itu sendiri yang semakin luas dalam peningkatan kebutuhan yang ada dalam keterbukaan informasi yang sangat akurat dan cepat dalam layanan ke masyarakat Desa Wonokerto. bahwa pengguna SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik di pemerintah Desa Wonokerto ini masih belum bisa di manfaatkan oleh pengguna masyarakat, karena terjadinya trouble pada SID (Sistem Informasi Desa) yang mengakibatkan pegawai Kantor Desa Wonokerto tidak dapat menginput data dalam website tersebut. Berikut adalah salah satu hasil gambar terjadinya trouble.

Dalam aspek pertama ini adalah perbaikan penggunaan di website Sistem Informasi Desa agar dapat mengoptimalkan atau bermanfaat terhadap para konstitusi dan masyarakat. Yang secara tidak langsung wakil rakyat bisa mengakses untuk keperluan dan kepentingan dengan cara cepat. Pengguna SID dalam layanan ini merupakan sebuah website yang ada beberapa fitur seperti : potensi desa, data penduduk, laporan anggaran desa, dan lain-lainnya. Jika penggunaan SID ini benar-benar di optimalkan atau di manfaatkan oleh pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur ini bisa jadi contoh untuk di terapkan oleh beberapa desa yang terplosok yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagai pengguna SID ini membutuhkan informasi atau permohonan semacam : Rencana Pembangunan Desa, APBD, Data Penduduk, dan lain-lainnya. Dan perlu diperhatikan atau semacam review karena manfaat yang ada masih belum terlaksana dengan baik di pemerintah Desa Wonokerto, terlihat dari masyarakat yang tidak dengan mudah mengakses untuk penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam informasi dan pelayanan melalui website Sistem Informasi Desa yang menyangkut prosedur dengan kualitas sistem informasi yang dibangun bersama yang telah sesuai dengan landasan hukum.

Efisiensi

Berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria dalam efisiensi, di antaranya:

- 1) Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi dan database yang bisa berjalan baik ketika dibutuhkan
- 2) Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik
- 3) Pemanfaatan platform teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek
- 4) Kualitas dan ruang lingkup pelatihan bagi para staf dan pegawai.

Fakta bahwa koordinasi dari pemerintah desa kepada Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang yang mengakibatkan dalam penanganan kendala di SID (Sistem Informasi Desa) ini belum cepat teratasi dan keterbatasan akan sumber daya manusia yang mengakibatkan penggunaan SID dalam pelayanan ini belum dikatakan efisien. Untuk meningkatkan efisiensi pentingnya dalam berbagai informasi didalam kantor Desa Wonokerto maupun diluar atau antar

pemerintahan harus saling berkoordinasi guna mengenai pentingnya memanfaatkan teknologi di Desa Wonokerto.

Dalam aspek kedua ini adalah perlu diperhatikan atau dipertimbangkan secara sungguh-sungguh yang paling penting keterlibatan antara seluruh pihak yang terkait dalam permasalahan teknis pelaksanaan bukan hanya sekedar strategis. Selain pemerintah desa, masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Pada dasarnya adalah sebuah sistem pemerintah desa yang terlibat penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik bisa mengoptimalkan secara efisien dalam penggunaan website tersebut. Dengan adanya informasi yang akurat dan baik melalui Sistem Informasi Desa sehingga koordinasi dari pemerintah desa kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sangat penting. Karena dapat membantu dalam penanganan kendala yang terjadi di SID dan proses penggunaan SID ini cepat teratasi dan dapat di gunakan oleh masyarakat

Partisipasi

Ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Beberapa kriteria dalam hal ini, di antaranya:

- 1) Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web
- 2) Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat
- 3) Pengaruh dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
- 4) Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas chatting, forum, milis).

Partisipasi atau keberadaan masyarakat di Desa Wonokerto begitu penting. Karena melibatkan setiap penyelenggaraan pemerintah desa guna mewujudkan demokratis yang di mana masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat Desa Wonokerto. Tidak hanya beberapa aspek, melainkan juga menghendaki dukungan dalam pelaksanaannya untuk ikut menikmati proses-proses atau hasil sekaligus dapat memantau dan mengevaluasi dari kinerja pemerintahan Desa Wonokerto. bahwa komunikasi antar organisasi masyarakat dengan pemerintah Desa Wonokerto sudah berjalan dengan baik secara langsung dan sudah saling memahami jika ada kendala dalam penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) ini.

Dalam Aspek ketiga ini adalah perlunya diperhatikan berbagai seluruh komponen masyarakat secara lebih aktif dalam proses pemerintahan desa. Efektivitas organisasi publik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat membantu atau melaporkan kendala permasalahan yang terjadi di penggunaan (SID) Sistem Informasi Desa ke pemerintah desa sejauh mana perbaikan atau penanganan SID yang telah sudah didesain ulang supaya berfokus pada masyarakat Desa Wonokerto akan keterbukaan informasi. Untuk komunikasi antar organisasi masyarakat dengan pemerintah Desa Wonokerto sudah berjalan dengan baik secara langsung dan sudah saling memahami jika ada kendala dalam penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) ini. Seperti dalam rangka penyusunan Rencana dan Anggaran Desa agar terlihat jelas tujuannya. Dalam kata lain masyarakat lebih memberikan berbagai saran dan pendapat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa terutama dalam penggunaan SID (Sistem

Informasi Desa) dalam pelayanan publik di Desa Wonokerto Kecamatan tekung Kabupaten Lumajang dan di jadikan suatu pertimbangan sebelum mengambil keputusan strategis untuk hal-hal yang reaktif dengan diberikannya koreksi dari beberapa anggota masyarakat atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Transparansi

Apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, di antaranya:

- 1) Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, dan lain-lain)
- 2) Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak.
- 3) Topicality of information

Bahwa untuk meningkatkan transparansi di sistem informasi desa dapat dengan mudah membantu pemerintah desa dalam hal penyajian informasi secara luas pada masyarakat Desa Wonokerto. Di mana pengguna utama layanan sistem informasi desa itu yang bisa berupa informasi profile desa, visi misi, struktur desa, dan kelembagaan (masyarakat, adat, karang taruna, dan Bumdes) dan informasi secara umum (kependudukan, sarana prasarana, potensi desa dan laporan keuangan) untuk mewujudkan pemerintah desa akan transparan kepada masyarakat Desa Wonokerto. Berdasarkan dari hasil penelitian ini yang sudah dilakukan, penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) peneliti mendapatkan beberapa keluhan dari masyarakat akan kurangnya keterbukaan informasi dalam penggunaan SID untuk pelayanannya. Namun, soal fasilitas seperti sarana dan prasarana ini sudah mendukung dan informasi akan anggaran maupun rencana pembangunan desa ini. Pemerintah Desa Wonokerto telah memberikan informasi yang sudah terpampang di depan Kantor Desa Wonokerto.

Dalam aspek keempat ini adalah pentingnya informasi dari pemerintah desa yang lebih terbuka. Keterbukaan kepada publik atau masyarakat ini dapat implikasi yang positif dari transparansi untuk pemberantasan praktik KKN, karena jika transparansi rendah ini akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Maka pentingnya partisipasi masyarakat adalah aktif dan kritis dalam mengawasi pemerintah desa dengan secara dialog atau demonstrasi tidak serta merta secara anarkis. Karena itu, tanpa adanya transparansi ini, masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dalam partisipasi tersebut yang harus didukung oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sehingga transparansi bukan hanya memberikan informasi saja kepada masyarakat tetapi sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi atau keterlibatan dalam kesadaran masyarakat terhadap pemerintah desa. Perlunya pemerintah desa lebih aktif untuk seluruh kinerja staf kepada masyarakat dan bukan hanya keterbukaan informasi tapi tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat

Manajemen Perubahan

Ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya:

1. Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di tempat lain.

2. Kualitas kontrol dan review
3. Keterlibatan dan motivasi dari pegawai.

Bahwa implementasi dalam teknologi informasi pada dasarnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk menggunakan fasilitas yang ada untuk mempermudah proses pelayanan terhadap pengguna SID (Sistem Informasi Desa) untuk memperkenalkan potensi desa dan interaksi masyarakat Desa Wonokerto dengan pemerintah desa. Untuk bisa memanfaatkan SID (Sistem Informasi Desa) diperlukannya proses kontrol yang dapat memastikan jika kualitas sistem yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat di pertanggung jawabkan oleh operasi atau admin dari pengguna SID. Oleh karna itu, peneliti menemukan dalam mengontrol penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik ini mengalami kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Diskominfo dan masih terkendala di keterbatasan sumber daya manusianya. Padahal SID (Sistem Informasi Desa) telah di dukung oleh pemerintah dalam kebijakannya. Tapi sangat disayangkan bahwa pegawai yang mengikuti apresiasi dari progam pemerintah ini masih terbatas.

Dalam aspek kelima ini adalah implementasi SID (Sistem Informasi Desa) bergerak secara dinamis, yang harus adanya monitoring yang ketat dalam pengontrolannya. Karena keterlibatan pegawai kantor Desa Wonokerto adalah aktor penting untuk pelaksanaannya jika mereka memiliki pengetahuan atau kemampuan yang memadai dan memiliki rasa yang kuat. Perlunya mendapatkan pelatihan yang memadai untuk pengembangan atau pengoptimalan (SID) Sistem Informasi Desa, keterlibatan pegawai Desa Wonokerto menjadi mutlak karena sebaik apapun kualitas sistem aplikasi dalam menjalankan tidak akan bisa mempunyai manfaat tanpa keterlibatan mereka. Dengan adanya berbagai pihak baik masyarakat, swasta, ataupun pemerintah kerjasama sangat dibutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan atau komponen untuk penggunaan website SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung yang terkait secara hal teknis yang diperlukan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Penggunaan SID (Sistem Informasi Desa)

Faktor pendukung dan faktor penghambat pada penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik di Pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung Penggunaan SID

1. Penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang sudah jelas dalam landasan hukumnya yakni : Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa. Dan telah terlaksana dengan baik meskipun pelaksanaannya belum efektif
2. Biaya atau anggaran yang ada di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung ini telah mencukupi dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, pemeliharaan, pengadaan dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan ini.

3. Adanya partisipasi dari masyarakat atau efektivitas organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang selalu memberikan pendapat atau masukan untuk pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung. Jadi komunikasi antar organisasi masyarakat dengan pemerintah Desa Wonokerto sudah berjalan dengan baik secara langsung

Faktor Penghambat Penggunaan SID

1. Sumber daya manusia yang ada di Kantor Desa Wonokerto ini kurang atau keterbatasan monitoring dalam pengontrolan SID (Sistem Informasi Desa) yang menyebabkan tidak semuanya dapat menguasai atau mengoperasikan SID sehingga kurangnya mengikuti perkembangan saat ini
2. Kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Lumajang. Yang dilaksanakan hanya 2 hari, yang menjadi penghambat kurangnya langsung penanganan dalam memperbaiki SID (Sistem Informasi Desa)
3. Koordinasi antara pemerintah Desa Wonokerto masih kurang terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Lumajang sehingga fungsi penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) ini belum bisa di manfaatkan kembali oleh masyarakat Desa Wonokerto karena lambatnya penanganan

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa fakta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan dalam penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) dalam pelayanan publik di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung belum berjalan dengan baik karena pelaksanaannya belum efektif. Di mana dalam pemanfaatan teknologi di pemerintah Desa Wonokerto penting karena teknologi yang ada harus segera di perbaiki semua kendala yang ada agar pengguna SID dalam layanan ini dapat dengan segera guna memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto. Sehingga penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Untuk faktor pendukung yakni; anggaran atau dana telah mencukupi dengan adanya kebijakan sebagai landasan hukumnya yang jelas dan partisipasi dari organisasi masyarakat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang begitu aktif. Sedangkan dalam faktor penghambat yakni ; kurangnya keahlian atau pemahaman teknologi yang di miliki karena dalam pelatihannya yang di sediakan masih kurang dan keterbatasannya sumber daya manusia pada pegawai kantor Desa Wonokerto dalam mengoperasikan penggunaan SID (Sistem Informasi Desa).

Saran

Dari hasil kesimpulan yang peneliti jelaskan diatas maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah desa Wonokerto harus terus mengkoordinasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mempercepat perbaikan yang ada di website Sistem Informasi Desa guna mempercepat ketersediaan informasi yang diberikan kepada masyarakat

2. Sebaiknya pihak Diskominfo untuk melaksanakan kembali pelatihan dan pendampingan dalam penerapan Sistem Informasi Desa untuk pegawai yang belum paham betul akan sistem penerapan SID agar mereka sewaktu-waktu dapat memperbaiki tanpa harus menunggu lama
3. Pemerintah desa segera memenuhi sumber daya manusia agar dapat menungjung pelaksanaan Sistem Informasi Desa untuk pengoperasian atau monitoring terhadap kualitas Sistem Informasi Desa
4. Pemerintah desa dan semua staf pegawai di kantor Desa Wonokerto harus lebih aktif lagi akan tanggung jawab bukan hanya soal ketersediaan informasi
5. Untuk pengguna SID (Sistem Informasi Desa) terutama masyarakat Desa Wonokerto diharapkan terus mendesak pihak pemerintah desa akan perbaikan di sistemnya guna dengan cepat dalam layanannya dan dapat dirasakan kembali manfaat teknologinya

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Kabupaten Lumajang (2019). *Peraturan Bupati Lumajang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Desa*. Pemerintah Kabupaten Lumajang. Provinsi Jawa Timur.
- Indrajit, Richardus Eko. 2007. *Electronic Government In Action :Strategi Implementasi di Berbagai Negara*
- Sidiq, R. D. N., & Suwitri, S. (2015). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen). *Journal of Public Policy and ...*, 20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22018%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/22018/20263>
- Sugiyono (2019). *Generalisasi*. 43. 43–51
- Umi Arifah. (2018). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK *Prosiding Senas POLHI Ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang* 17, 17–28. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2428>
<https://www.wonokerto-tekung.lumajangkab.go.id/>